

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Kota Padang

Gambar 1. 1 Logo Kota Padang

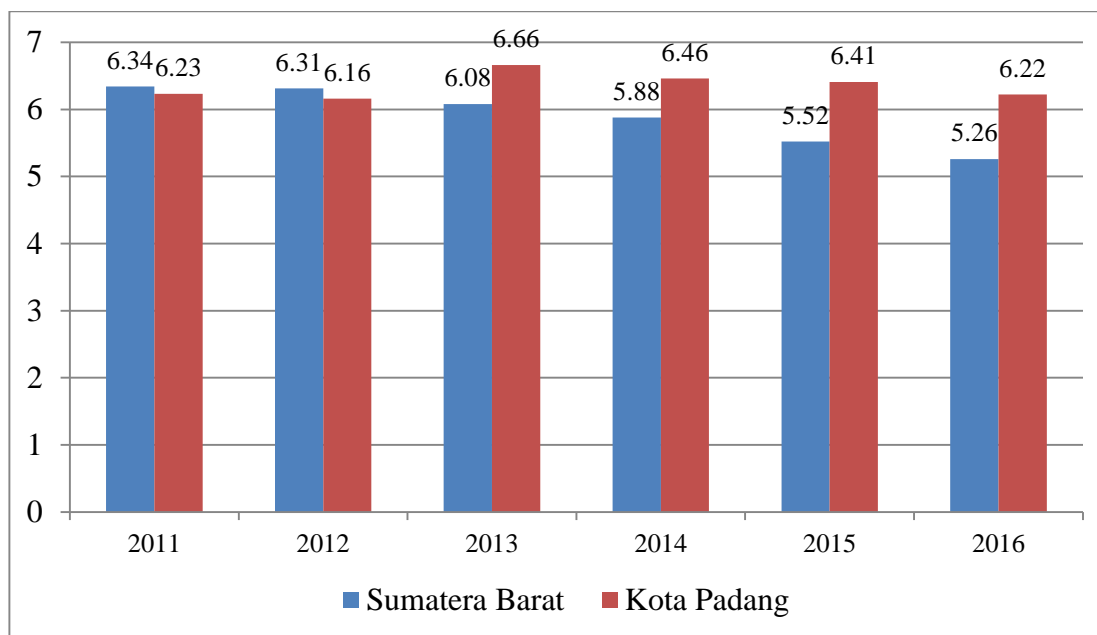


(Sumber : www.padang.go.id)

Kota Padang adalah salah satu kota yang terletak di Pulau Sumatera, dan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), disamping itu Kota Padang juga sebagai ibu kota dan pusat pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan PP No 17 tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 165,35 Km. Pada tahun 2018, penduduk Kota Padang mencapai 5.382.077 jiwa (www.sumbar.bps.go.id,2018).

Perekonomian Kota Padang dilihat berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Berikut persentase pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2011-2016:

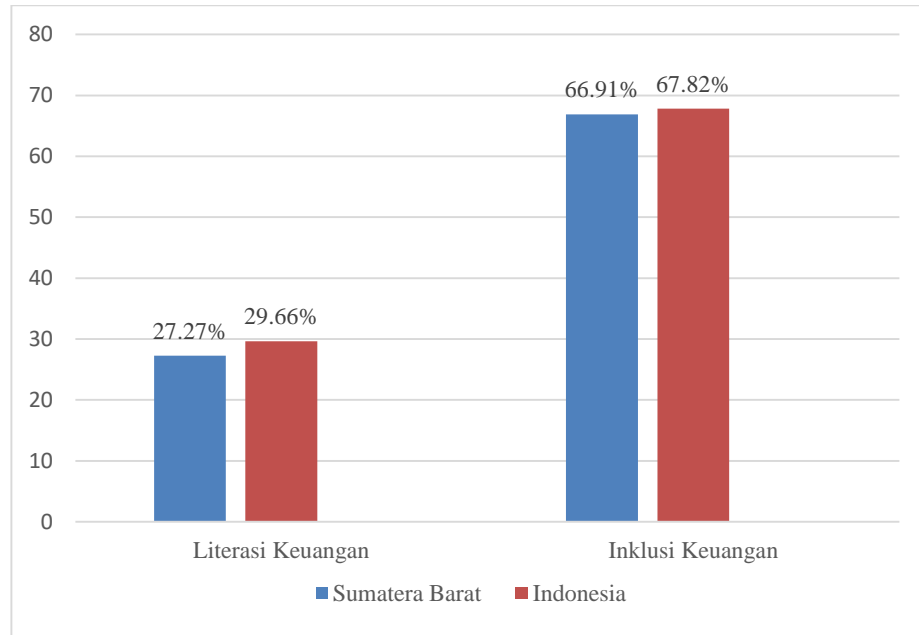
Gambar 1. 2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2016 (dalam persen)



(Sumber : *sumbar.bps.go.id*, 2016)

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat perkembangan laju perekonomian di Kota Padang dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Selain dari segi pendidikan, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang juga di dukung oleh pariwisata yang memadai, seperti wisata pantai dan wisata gunung. Selain dari segi pendidikan dan wisata, untuk kebudayaan, Kota Padang juga memiliki budaya yang kuat, banyak masyarakat di Kota Padang yang masih menganut budaya dan adat yang di bawa dari nenek moyang mereka, hal tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan. Seperti layaknya sebuah Ibu Kota Provinsi, Kota Padang merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan masyarakat dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gambar 1.3 Tingkat Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2016 (Dalam Persen)



(Sumber : www.ojk.go.id, *Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*)

Jika dilihat dari tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan, Kota Padang masih dibawah tingkat rata-rata nasional. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 tingkat literasi keuangan di Kota Padang sebesar 24%, 27.27% untuk Provinsi Sumatera Barat dan 29.66% untuk tingkat literasi keuangan di Indonesia (sumbar.antaraneews.com, 2018). Sedangkan pada grafik 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat inklusi keuangan Provinsi Sumatera Barat sebesar 66.91% dan Indonesia sebesar 67.82%. Melihat perbedaan yang signifikan antara tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di Sumatera Barat artinya masyarakat yang menggunakan produk lembaga jasa keuangan sudah banyak, tetapi belum semua mempunyai edukasi yang cukup mengenai hal tersebut. Maka OJK perlu memperluas edukasi dan sosialisasi mengenai industri keuangan kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang salah satunya dengan memanfaatkan peran modal sosial yang ada di daerah tersebut.

1.1.2 Visi dan Misi Kota Padang

a. Visi Kota Padang

Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya

b. Misi Kota Padang

Untuk mewujudkan visi, maka misi Kota Padang sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera.
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

1.2 Latar Belakang Masalah

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen maupun masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik serta kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*mis management*) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Memiliki literasi keuangan merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat yang tentunya ditunjang oleh literasi keuangan yang baik, maka taraf kehidupan diharapkan dapat meningkat, hal ini berlaku untuk setiap tingkat penghasilan, karena

bagaimanapun tingginya tingkat penghasilan seseorang, tanpa pengelolaan yang tepat, keamanan finansial pasti akan sulit dicapai. (Mendari& Kewal, 2013)

Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang untuk seluruh golongan masyarakat seperti meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* bahkan *not literate* menjadi *well literate* serta meningkatkan jumlah pengguna produk dan penyedia jasa keuangan, seperti *service* yang ditawarkan oleh perbankan ataupun lembaga – lembaga masyarakat. *Well literate* akan menjadikan masyarakat melek finansial. Dengan adanya kemampuan dalam literasi keuangan maka akan berdampak pada peningkatan inklusi keuangan (www.ojk.go.id , Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Inklusi berarti termasuk atau terhitung. Oleh sebab itu inklusi keuangan merujuk pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan di Indonesia. Jenis-jenis jasa keuangan yang ada seperti penyimpanan uang, transfer, peminjaman uang, investasi, asuransi dan lain sebagainya.

Menurut Bank Indonesia (2018) keuangan inklusif mampu memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah, dan pihak swasta yaitu antara lain :

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.

Meningkatkan serta memaksimalkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga harapannya ini bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan dan menurunkan tingkat kesenjangan.

2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.

Keuangan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagian dari strategi untuk mencapai stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses pada layanan keuangan. Manfaat keuangan inklusif adalah memberikan akses pada jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk.

3. Mengurangi *shadow banking*, yaitu mengurangi lembaga keuangan non-bank yang menjalankan bisnis atau bertindak seolah-olah perbankan.

4. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Maka dengan menysasar pada permasalahan tersebut akan menjadi terobosan dalam pendalaman pasar keuangan untuk menyederhanakan akses jasa keuangan bagi mereka.
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
Keuangan inklusif mampu menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
6. Mendukung peningkatan *Human Development Index*
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan sehingga mampu mendukung pengembangan, inovasi dan implementasi program keuangan inklusif.
8. Mengurangi kesenjangan dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

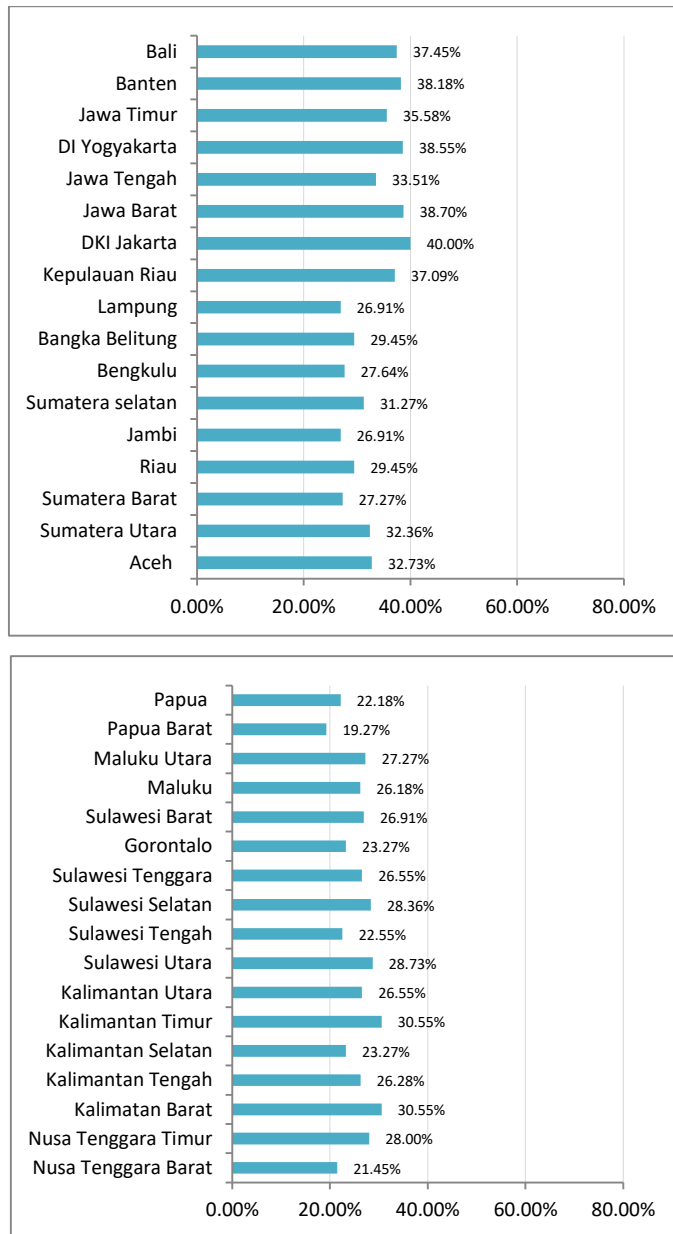
Gambar 1. 4 Indeks Literasi Keuangan



(Sumber : www.ojk.go.id, Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016)

Dilihat dari data pada gambar 1.4 indeks literasi keuangan Indonesia dari tahun 2013 dan tahun 2016 meningkat 7.82% dari 21.84% menjadi 29.66%. Itu menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Indonesai mengenai keuangan membaik.

Gambar 1. 5 Indeks Literasi Keuangan Provinsi 2016



(Sumber : www.ojk.go.id, Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016)

Data pada gambar 1.5 menunjukkan persentase indeks literasi keuangan provinsi di Indonesia. Pada gambar 1.5 dapat dilihat tingkat indeks literasi keuangan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 27.27%. Dari gambar 1.4 dan 1.5 dapat dilihat bahwa posisi Provinsi Sumatera Barat memiliki indeks literasi keuangan yang cukup bagus jika di

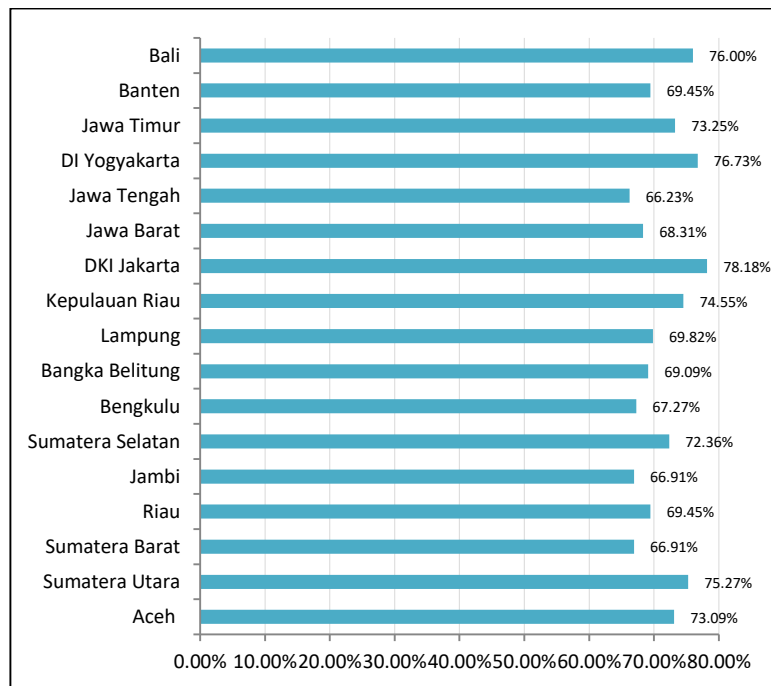
bandingkan dengan target yang ingin di capai pemerintah pada tahun 2019 nanti yaitu mencapai 35% (Padangkita.com, 2018).

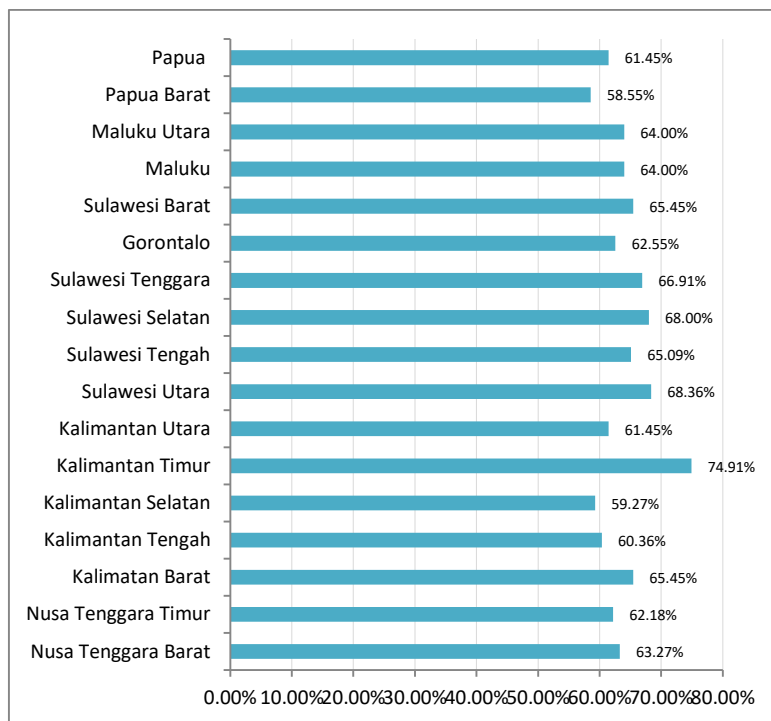
Gambar 1. 6 Indeks Inklusi Keuangan



(Sumber : www.ojk.go.id, Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016)

Gambar 1. 7 Indeks Inklusi Keuangan Provinsi 2016





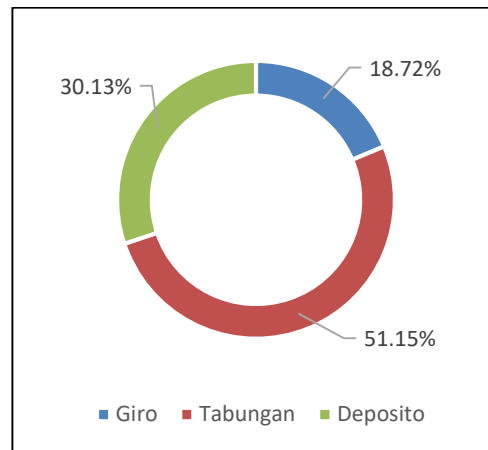
(Sumber : www.ojk.go.id, Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016)

Dari gambar 1.6 menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia tahun 2013 dan 2016 meningkat 8.08% dari tahun 2013 sebesar 59.74% naik menjadi 67.82% di tahun 2016. Pada gambar 1.7 yang menunjukkan indeks inklusi keuangan provinsi - provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat memperoleh presentase sebesar 66.91%. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong perluasan program Inklusi Keuangan guna mendukung sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) yakni tingkat literasi keuangan sebesar 75% pada akhir 2019. (www.ojk.go.id , Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sumatera Barat masih dibawah angka nasional, sehingga perlu perluasan edukasi dan sosialisasi yang lebih massif mengenai industri keuangan di masyarakat Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh OJK adalah dengan meminta pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan layanan pengaduan guna mempermudah informasi bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Dengan adanya unit layanan pengaduan tersebut, diharapkan

masyarakat yang belum paham bisa mendapatkan informasi lebih lengkap melalui unit tersebut (padangkita.com, 2018).

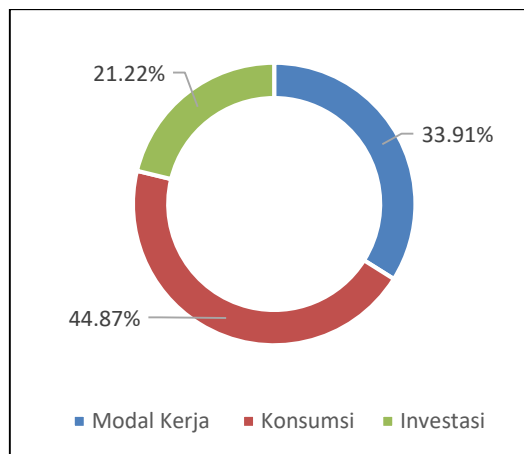
Gambar 1. 8 Pangsa DPK Bank Umum Berdasarkan Jenis Simpanan Di Sumatera Barat Tahun 2017



(sumber : Bank Indonesia,2017)

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Kegiatan penghimpunan dana dibagi menjadi tiga jenis yaitu tabungan, giro dan deposito. Berdasarkan gambar 1.8 penghimpunan DPK oleh perbankan Sumatera Barat didominasi oleh jenis simpanan tabungan yaitu 51.15%, deposito sebesar 30.13% dan giro sebesar 18.72%.

Gambar 1. 9 Pangsa Kredit Berdasarkan Penggunaan Di Sumatera Barat Tahun 2017



(sumber : Bank Indonesia,2017)

Berdasarkan gambar 1.9 dapat dilihat bahwa penggunaan kredit di dominasi untuk kegiatan konsumsi dengan persentase 44.87%, modal kerja sebesar 33.91% dan untuk investasi sebesar 21.22%. Peningkatan jumlah DPK akan berdampak pada semakin banyak pula proporsi dana yang disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kondisi ini mengakibatkan semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan layanan yang diberikan oleh perbankan sehingga semakin meningkatkan persentase inklusi keuangan di Sumatera Barat.

Dari perbedaan tingkat inklusi dan literasi di Sumatera Barat umumnya dan di Kota Padang khususnya, artinya masyarakat yang menggunakan produk lembaga jasa keuangan sudah banyak, tetapi belum semuanya paham dengan produk yang tersedia, mereka belum memiliki cukup pengetahuan mengenai apa yang mereka gunakan. Masyarakat Kota Padang yang terkenal dengan masyarakat yang pandai dalam berbisnis, ini menjadikan mereka menggunakan jasa lembaga keuangan misalkan bank untuk menyimpan uang ataupun penggunaan kredit. Namun mereka belum memiliki pengetahuan lebih tentang jasa-jasa apa saja yang di tawarkan oleh bank. Kondisi tersebut menjadi tidak ideal karena penggunaan produk keuangan hendaknya diimbangi dengan pengetahuan yang cukup mengenai lembaga jasa keuangan. Pada bulan Oktober 2017 dalam rangka memperingati bulan inklusi, OJK mengadakan lomba “Rangking 1” yang bertujuan mengedukasi peserta didik mengenai sektor dan jasa keuangan, yang dilakukan di Universitas Negeri Padang, Kota Padang. Selain itu pemerintah Kota Padang juga bekerja sama dengan perbankan dalam pengadakan produk perbankan yaitu Simpanan Pelajar (simPel). Hingga bulan September 2017 sudah 714 sekolah yang menjalin kerjasama dengan simPel dan 33.269 siswa di Sumatera Barat yang telah menjadi nasabah simPel, sedangkan berdasarkan data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah sekolah tingkat dasar dan menengah di Sumatera Barat terdapat 6.352 sekolah dengan jumlah pelajar 1.075.108 siswa. Ini menunjukkan bahwa baru sekitar 11.24% sekolah yang telah bekerja sama dengan pihak simPel dan hanya 3.09% siswa yang menjadi nasabah tabungan simPel (sumbar.antaraneews.com,2018).

Cude et.al (2006) dalam Rasyid (2012) menyatakan bahwa seiring berkembangnya instrumen keuangan, tidak diringi oleh keinginan masyarakat untuk memulai berinvestasi, dan rendahnya literasi keuangan, salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya pengetahuan tentang jasa keuangan adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Selain tingkat pendidikan, kondisi ekonomi juga berpengaruh dalam peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Byrne (2007) dalam Rasyid (2012) menambahkan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah, dan menyebabkan pencapaian kesejahteraan dapat dicapai pada usia tidak produktif lagi. Orton (2007) dalam Rasyid (2012) memperjelas dengan menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan seseorang karena literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi.

Modal sosial merupakan hal yang berkaitan dengan solidaritas, kepercayaan diri, dan memfasilitasi dalam menjalankan suatu bisnis, yang merupakan faktor yang berasal dari hubungan sosial yang melibatkan keluarga, teman, rekan kerja, dan lain-lain (Felicio *et.al.* 2014). Modal sosial juga merupakan investasi sosial, yang terdiri dari sumber daya seperti jaringan, kepercayaan, nilai, norma serta kekuatan yang menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya (Damsar, 2011:211).

Menurut penelitian Yanti (2017) modal sosial hanya dapat dibangun ketika setiap individu belajar dan mau belajar mempercayai individu lain. Adanya kepercayaan membuat mereka mau menghasilkan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan. Modal sosial merujuk pada jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Modal sosial juga berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat atau sebagai sumber dalam memperoleh informasi, menjalin kerja sama dan lainnya. Contoh pengembangan modal sosial dalam bermasyarakat terdapat pada adanya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial pada usaha Rubik Ganepo yang memungkinkan terjalinnya kerjasama antar aktor pasar. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Hal inilah yang sekilas tergambar dalam

diri pengusaha Rubik Ganepo dimana terjalin kerjasama antar pengusaha Rubik Ganepo, pemasok maupun pihak pemasaran sehingga dapat dikatakan terdapat suatu kepercayaan, norma serta jaringan yang terbentuk. Banyaknya masyarakat menekuni usaha tersebut membuat persaingan dalam usaha tidak dapat dipungkuri lagi. Ditengah persaingan usaha yang telah terjadi, usaha Rubik Ganepo ini masih bertahan dan masih memproduksi dalam usahanya serta mampu menembus pasar ke berbagai daerah. Eksistensi usaha ini tidak akan tumbuh dan berkembang apabila tidak didukung oleh modal lainnya seperti modal sosial. Contoh lain dari penerapan modal sosial dalam bermasyarakat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk terus mendorong perluasan program Inklusi Keuangan guna mendukung sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) yakni tingkat inklusi keuangan sebesar 75% pada akhir 2019 OJK menciptakan program “Laku Pandai” yaitu layanan keuangan tanpa kantor. Produk Laku Pandai yang terus dikembangkan ke daerah berupa tabungan, asuransi mikro hingga kredit mikro. Kegiatan "Elok Laku Pandai Manabuang" yang diadakan di Kota Padang pada Desember 2016 diikuti sekitar 2.000 peserta. Program Laku Pandai yang salah satunya bekerja sama dengan bank BTPN yang dinamakan BTPN WOW telah mencapai 2.5 juta nasabah dengan 147 ribu agen (www.ojk.co.id,2018).

Kamarni (2012) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa di Kota Padang selama ini telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan yang ada dari segi organisasi atau kelembagaan modern. Padahal di sisi lain pemerintah sebagai *Stakeholder* dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah atau saluran pembangunan bahkan merupakan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan. Berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan dengan pertimbangan bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibuat pemerintah yang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan pembangunan itu sendiri dari pada pemerintah menggunakan

lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional. Dengan adanya peran modal sosial seperti lembaga keuangan, lembaga kemasyarakatan sebagai mediator antara literasi keuangan dan inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai keuangan di masyarakat Kota Padang.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bongomin et.al (2016) dengan topik "*Social capital: mediator of financial literacy and financial inclusion in rural Uganda*" menemukan bahwa adanya mediasi penuh oleh modal sosial terhadap hubungan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Temuan ini menunjukkan peran modal sosial dalam memediasi dan meningkatkan berbagai sumber daya yang langka termasuk pengetahuan dan keterampilan mengenai jasa dan produk keuangan yang diperoleh oleh rumah tangga miskin di Uganda. Saputra&Dewi(2017) juga melakukan penelitian dengan topik "Peran modal sosial sebagai mediator literasi keuangan dan inklusi keuangan pada kaum muda di Indonesia" menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, namun juga terdapat temuan bahwa dampak literasi keuangan pada inklusi keuangan akan meningkat jika terdapat peran modal sosial, hal ini berarti efek langsung literasi keuangan pada inklusi keuangan dapat dikatakan rendah. Mengingat adanya peran modal sosial dan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Kota Padang, maka peneliti bermaksud untuk meneliti "**Peran Modal Sosial Sebagai Mediator Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Di Kota Padang**".

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Perbedaan angka Literasi dan Inklusi keuangan di Kota Padang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Padang dalam memahami Literasi Keuangan dan meningkatkan Inklusi Keuangan. Dikarenakan peran literasi keuangan

dan inklusi keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan.

Dilihat dari tingginya tingkat inklusi keuangan di Kota Padang menerangkan bahwa masyarakat di Kota Padang memiliki minat yang tinggi terhadap jasa keuangan khususnya dalam hal menabung, namun mereka belum memahami lebih mengenai jasa – jasa lainnya yang ditawarkan oleh lembaga keuangan sehingga mengakibatkan angka literasi keuangan di Kota Padang menjadi lebih rendah. Modal sosial yang telah ada dan terus dikembangkan oleh pemerintah sebagai *stakeholder* dan juga terus berkerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti perbankan dalam meningkatkan peran modal sosial yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan tersebut.

Beberapa studi terdahulu yang terkait dengan masalah modal sosial sebagai mediator literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadikan Indonesia secara umum sebagai objek studi kasus dalam penelitian. Melihat dari perbedaan geografi dan demografi maka dalam studi ini mengambil Kota Padang sebagai objek yang perlu diteliti.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah literasi keuangan memiliki efek yang signifikan terhadap modal sosial?
2. Apakah modal sosial memiliki efek yang signifikan pada inklusi keuangan ?
3. Apakah modal sosial memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jabarkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan memiliki efek yang signifikan pada modal sosial,

2. Untuk mengetahui apakah modal sosial memiliki efek yang signifikan terhadap inklusi keuangan,
3. Untuk mengetahui apakah modal sosial mampu memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.6.1 Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti lain dengan topik pembahasan mengenai modal sosial, literasi keuangan dan inklusi keuangan.

1.6.2 Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai modal sosial dan literasi keuangan sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sehari – hari

b. Bagi Masyarakat Kota Padang

Penelitian ini di harapkan dapat menyadarkan masyarakat di kota Padang mengenai peran modal sosial sebagai mediator, serta menambah pengetahuan mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Variabel independen dari penelitian ini adalah Literasi keuangan. Variabel dependen atau variabel hasil dari penelitian ini adalah Inklusi keuangan, dengan variabel mediasinya adalah modal sosial. Pernyataan dalam variabel penelitian ini di sesuaikan dengan keadaan objek penelitian.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah masyarakat di seluruh *chapter* di Kota Padang.

1.8 SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi yang terdapat dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang gambaran secara umum mengenai objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan dan pertanyaan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematis penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai literature penelitian yang berkaitan dengan tinjauan pustaka yang mendukung solusi dari permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini di paparkan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dilakukan, pengumpulan data, populasi dan sample, uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji korelasi pearson, uji asumsi klasik, dan analisis mediasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini di uraikan berdasarkan hasil dari olahan data sesuai metode yang digunakan, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan untuk permasalahan yang sudah di rumuskan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan dari bab – bab sebelumnya serta, saran yang di kemukakan oleh peneliti untuk perbaikan masalah di masa sekarang dan di masa yang akan datang.